

Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Baubau

Ivan Pahlevi (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)

A. Gau Kadir (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)

A. Murfhi (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)

Email: ivan_pahlevi@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of the oversight function performed as a local government watchdog and what influences oversight function performed by the Inspectorate of Baubau. This research was conducted in the City Baubau, with informants inspectorate employees who are considered competent. Pengumpulan data is done through field observations and in-depth interviews. This research method is descriptive qualitative. The effectiveness of the oversight function performed by the State Inspectorate Baubau three namely: First, the preparation of the monitoring conducted by the inspectorate officials authors assume that what was done by the inspectorate officials have been quite effective in accordance with standard operating procedures that apply every year. Second, the implementation of the monitoring conducted by the inspectorate officials authors assume that what was done by the inspectorate officials have not been effective. Third, the effectiveness of the accountability report on the preparation and supervision of each SKPDs been checked yet supported by the availability of accurate data / valid in order to be served. Factors affecting the implementation of supervisory functions of the inspectorate in the regional administration in the City Baubau are: (1) Internal factors and (2) External Factors.

Keywords: Function, monitoring, inspectorate

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas fungsi pengawasan yang dilakukan sebagai pengawas pemerintahan daerah dan apa yang mempengaruhi fungsinya pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Baubau. Penelitian ini dilakukan di Kota Baubau, dengan informan pegawai inspektorat yang dianggap memiliki kompetensi. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Baubau ada tiga yakni : Pertama, penyusunan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat inspektorat penulis menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pejabat inspektorat sudah cukup efektif sesuai dengan SOP yang diberlakukan disetiap tahunnya. Kedua, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat inspektorat penulis menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pejabat inspektorat belum efektif. Ketiga, efektivitas pelaksanaan penyusunan dan pertanggungjawaban laporan hasil pengawasan dari masing-masing SKPD yang sudah diperiksa belum ditunjang oleh ketersediaan data yang akurat/valid guna dapat disajikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Baubau adalah : (1) Faktor internal dan (2) Faktor Eksternal.

Kata kunci: Fungsi, pengawasan, inspektorat

PENDAHULUAN

Perubahan Paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah (otonomi daerah) di Indonesia dari pola sentralisasi menjadi pola yang terdesentralisasi membawa konsekuensi terhadap makin besarnya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara otonom.

Otonomi daerah dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat secara bertanggung jawab menurut prakarsa sendiri, serta berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang luas tentu membutuhkan pengawasan yang optimal, karena tanpa pengawasan terbuka peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan, sehingga akan mengakibatkan kerugian keuangan negara dan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan tugas pokok suatu organisasi, tidak akan tercapai dengan baik jika faktor pelaksanaan pengawasan belum sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan yang kurang baik akan berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan pengawasan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itulah akan diterapkan petunjuk yang akan dilakukan guna menunjang efektivitas perencanaan pengawasan. (Victor.1994, hal. 39)

Fungsi pengawasan pemerintahan daerah memiliki kewenangan berjenjang dan terintegrasi dalam mekanisme pengawasan dan pemeriksaan, sedangkan sasaran pengawasan adalah ditemukannya penyimpangan atas rencana atau target. Tindakan yang dilakukan antara lain mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan, menyarankan agar ditekan adanya pemborosan, mengoptimal-

kan pekerjaan untuk mencapai sasaran sesuai dengan rencana, menilai kinerja aparat pemerintah, sebagai institusi pelatihan dan clearing house serta pemberian masukan kepada Top Management (pimpinan) tentang kondisi dan solusi distorsi birokrasi. Fenomena belum efisien dan efektifnya peranan pengawasan fungsional pemerintah tidak hanya bersifat umum, namun juga bersifat khusus di lingkungan pemerintah daerah, sehingga dirasakan kebutuhan akan pentingnya suatu bentuk koordinasi yang tepat, dan komitmen yang tinggi dalam upaya efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam penulisan skripsi dengan judul “Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Baubau”, dengan tujuan sebagai berikut: Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Baubau; dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kota Baubau.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Kota Baubau memiliki tugas mengawasi serta mengontrol jalannya pemerintahan agar supaya penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Namun saat ini jumlah aparatur pengawas yang terlibat langsung dalam melakukan pemeriksaan masih sangat kurang.

Selain itu Inspektorat Kota Baubau belum memiliki pejabat fungsional, sementara yang melakukan pengawasan hanyalah pejabat struktural sehingga saat ini sebagian pejabat inspektorat terpaksa merangkap jabatan sebagai pengawas fungsional. Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi indikator dalam menilai pelaksanaan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Baubau, maka pembahasan dalam penelitian ini ditekankan dalam menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Kota Baubau. Dimana indikator penilaian yang digunakan dalam menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, penulis menetapkan beberapa indikator yang diambil dari pendapat yang sebagaimana dikemukakan oleh Sarwoto bahwa suatu pelaksanaan pengawasan yang efektif jika ditunjang oleh ketepatan waktu, obyektif, dan akurat.

Dalam melakukan penilaian efektivitas fungsi pengawasan, yang menjadi titik fokus dalam pembahasan adalah efektivitas perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan dan pertanggungjawaban pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya di Kota Baubau. Kemudian dari hasil penilaian mengenai efektivitas dalam penyusunan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat inspektorat penulis menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pejabat inspektorat sudah cukup efektif sesuai dengan SOP yang diberlakukan disetiap tahunnya.

Kemudian dari pelaksanaan pengawasan yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Baubau belum efektif dengan mengamati hasil wawancara dan apa yang telah penulis utarakan dalam pembahasan ini. Salah satu faktor yang menyebabkan yakni lambatnya pengumpulan data yang akan digunakan dalam melakukan pemeriksaan. Selain itu dalam melakukan pemeriksaan seringkali para pejabat daerah yang

ingin diperiksa tidak sedang berada di lokasi pemeriksaan.

Kemudian dilihat dari efektivitas pelaksanaan penyusunan dan pertanggungjawaban laporan hasil pengawasan dari masing-masing SKPD yang sudah diperiksa belum ditunjang oleh ketersediaan data yang akurat/valid guna dapat disajikan sehingga menyebabkan lambatnya penyusunan laporan hasil pengawasan yang berdampak pula pada waktu pertanggungjawabannya.

Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kota Baubau

Penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih ditujukan dalam meningkatkan kinerja pembangunan di setiap sektor. Oleh karena itulah salah satu cara yang dilakukan dalam pencapaian kinerja pembangunan adalah melalui pengawasan, dimana fungsi dan peran pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan apabila aktivitas yang dilakukan oleh aparat pemerintahan daerah telah sesuai dengan yang direncanakan, dan selain itu dilakukan tindakan korektif dari hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Perencanaan Program Pengawasan Inspektorat Kota Baubau

Salah satu yang menjadi hal yang paling mendasar dalam sebuah pencapaian suatu organisasi adalah terletak dari bagaimana organisasi tersebut mampu membuat suatu perencanaan. Sebagai lembaga pemerintahan daerah yang memiliki tujuan mengawasi jalannya pemerintahan di suatu daerah. Inspektorat Kota Baubau tentu memiliki sebuah perencanaan untuk bisa mengawasi jalannya pemerintahan yang ada di daerah Kota Baubau.

Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Kota Baubau

Berdasarkan hasil penilaian mengenai efektifitas perencanaan pengawasan yang dilakukan maka penilaian selanjutnya yaitu

bagaimana efektivitas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Baubau. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan inspektorat telah menjadi kewajiban bagi para pejabat Inspektorat Kota Baubau untuk dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman pengawasan yang telah dibuat dalam bentuk PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan).

Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan

Sebagai kegiatan terakhir dari tugas pemeriksaan adalah penyusunan laporan hasil pemeriksaan (LHP). Laporan tersebut adalah sarana komunikasi yang resmi dan sangat penting bagi pemeriksa untuk menyampaikan informasi tentang temuan, kesimpulan, dan rekomendasi kepada auditan atau yang perlu mengetahui informasi tersebut. LHP dibuat berdasarkan kertas kerja pemeriksaan dan naskah hasil audit yang disusun selama melaksanakan audit agar informasi akurat dan objektif.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Fungsi Pengawasan Inspektorat Kota Baubau

Di dalam melakukan aktivitasnya sebagai pengawas fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat Kota Baubau tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi pengawasan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Baubau. Faktor-faktor tersebut yakni: faktor internal yaitu jumlah aparat pengawas, dan faktor eksternal yaitu ketersediaan anggaran dan kelalaian objek pemeriksaan

1) Faktor Internal

Sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Kota Baubau memiliki tugas mengawasi serta mengontrol jalannya pemerintahan agar supaya penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Untuk bisa mengefektifkan fungsi

pengawasannya, tentu tidak terlepas dari banyaknya jumlah aparat pengawasnya.

2) Faktor Eksternal

Faktor lain yang menghambat fungsi pengawasan Inspektorat Kota Baubau yakni adanya faktor eksternal yakni berupa ketersediaan anggaran yang diberikan serta adanya kelalaian yang dilakukan objek pemeriksaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi indikator dalam menilai pelaksanaan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Baubau, maka pembahasan dalam penelitian ini ditekankan dalam menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Kota Baubau. Dimana indikator penilaian yang digunakan dalam menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, penulis menetapkan beberapa indikator yang diambil dari pendapat yang sebagaimana dikemukakan oleh Sarwoto bahwa suatu pelaksanaan pengawasan yang efektif jika ditunjang oleh ketepatan waktu, obyektif, dan akurat.

Dalam melakukan penilaian efektivitas fungsi pengawasan, yang menjadi titik fokus dalam pembahasan adalah efektivitas perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan dan pertanggungjawaban pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya di Kota Baubau. Kemudian dari hasil penilaian mengenai efektivitas dalam penyusunan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat inspektorat penulis menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pejabat inspektorat sudah cukup efektif sesuai dengan SOP yang diberlakukan disetiap tahunnya. Kemudian dari pelaksanaan pengawasan yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Baubau belum efektif dengan mengamati hasil wa-

wawancara dan apa yang telah penulis utarakan dalam pembahasan sebelumnya. Salah satu faktor yang menyebabkan yakni lambatnya pengumpulan data yang akan digunakan dalam melakukan pemeriksaan. Selain itu dalam melakukan pemeriksaan seringkali para pejabat daerah yang ingin diperiksa tidak sedang berada di lokasi pemeriksaan.

Kemudian dilihat dari efektivitas pelaksanaan penyusunan dan pertanggungjawaban laporan hasil pengawasan dari masing-masing SKPD yang sudah diperiksa belum ditunjang oleh ketersediaan data yang akurat/valid guna dapat disajikan sehingga menyebabkan lambatnya penyusunan laporan hasil pengawasan yang berdampak pula pada waktu pertanggungjawabannya.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Fungsi Pengawasan Inspektorat Kota Baubau, yaitu: a) Faktor Internal, sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Kota Baubau memiliki tugas mengawasi serta mengontrol jalannya pemerintahan agar supaya penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Namun saat ini jumlah aparatur pengawas yang terlibat langsung dalam melakukan pemeriksaan masih sangat kurang. Selain itu Inspektorat Kota Baubau belum memiliki pejabat fungsional, sementara yang melakukan pengawasan hanyalah pejabat struktural sehingga saat ini sebagian pejabat inspektorat terpaksa merangkap jabatan sebagai pengawas fungsional;

b) Faktor Eksternal, di dalam melakukan pemeriksaan tentu dibarengi dengan anggaran yang dibutuhkan didalam melakukan pemeriksaan. Namun anggaran yang diberikan kepada Inspektorat Kota Baubau tidak sesuai dengan jumlah SKPD yang akan diperiksa sehingga mengakibatkan objek pemeriksaan berkurang dari apa yang telah direncanakan. Selain ketersediaan anggaran yang diberikan, faktor lain seringkali dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada saat pemeriksaan itu terlambat diberikan oleh

SKPD yang diperiksa. Selain itu pejabat pemerintah yang diperiksa seringkali tidak sedang berada di lokasi saat aparat melakukan pemeriksaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintang, Susmanto. (2009). *Pengawasan Fungsional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2000). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fathoni, Abdurrahmat. (2006). *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Reksohadiprodjo, Sukanto. (2008). *Dasar-dasar Manajemen*. Edisi Keenam, cetakan kelima. Yogyakarta: BPFE.
- Trisnawati, Sule Erni. Kurniawan Saefullah, (2005). *Pengantar Manajemen*. Edisi pertama, cetakan pertama. Jakarta: Prenada Media.
- Sarwoto. (2010). *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siswandi. Indra Iman. (2009). *Aplikasi Manajemen Perusahaan*. Edisi kedua. Jakarta: Mitra Wicana Media.
- Siagian, P. Sondang. (2008). *Pengantar Manajemen*. Edisi pertama. Jakarta: Bumi Aksara.
- Terry, George R, dan Leslie W, Rue. (2010). *Dasar-dasar Manajemen*. edisi bahasa Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Victor, M. Situmorang, dan Jusuf Juhir. (1994). *Aspek Hukum Pengawasan Melakat*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- _____. (1994). *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

DOKUMEN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER / 05 / M.PAN / 03/2008 tanggal 31 Maret 2008.

_____.(2008). *Petunjuk Operasional Pemeriksaan Reguler*. Inspektorat. Kota Baubau.

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Baubau.

Peraturan Walikota Baubau Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Baubau.